SANKSI HUKUMAN DISIPLIN BAGI WARGA BINAAN YANG MELANGGAR TATA TERTIB DI LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN

¹ Ilham Mondzir Fathony, ²Win Yuli Wardani, ³Suhaimi, ⁴Gatot Subroto,
¹Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura
^{2,3,4}Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura,

Email: deriqbase186@gmail.com

Abstrack

This research has several objectives, including: first, to find out the role of disciplinary punishment for inmates in Pamekasan Class IIA Narcotics Prison; second, the implementation of disciplinary sanctions for inmates who violate the rules and regulations at Pamekasan Class IIA Narcotics Prison. In this research, researchers used empirical legal research with a qualitative approach. The research results show that: first, the role of disciplinary punishment for inmates in Pamekasan Class IIA Narcotics Prison is very important because it creates a sense of security and order for inmates. With disciplinary punishment, inmates are obliged to obey and comply with every prohibition in prison. However, disciplinary punishment cannot guarantee that inmates will obey the rules and not commit crimes again; secondly, the implementation of disciplinary sanctions for inmates who violate the rules and regulations at the Pamekasan Class IIA Narcotics Prison, namely, if the prisoner violates the rules, the Head of Security at the Correctional Institution asks the security and order administration section to carry out an inspection and make a Minutes of Investigation of subsequent violations of the rules. handed over to the Chair of the Observer Supervisory Team for immediate trial. Then the results of the examination carried out by the TPP will then be taken into consideration by the Head of Prisons in imposing disciplinary sentences. Disciplinary punishment can be in the form of punishment in accordance with the provisions of Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 concerning Rules and Regulations for Correctional Institutions and State Detention Centers.

Keyword : e Disciplinary Punishment Sanctions, Inmates, Rules and Regulations.

Abstrak

Dalam penelitian ini, memiliki beberapa tujaun, diantaranya ialah: pertama, untuk mengetahui peranan hukuman disiplin bagi warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan; kedua, pelaksanaan sanksi hukuman disiplin bagi warga binaan yang melanggar tata tertib di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, peranan hukuman disiplin bagi warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, ialah sangatlah penting dikarenakan untuk menciptakan rasa aman dan tertib bagi warga binaan. Dengan adanya hukuman disiplin, warga binaan berkewajiban menaati dan mematuhi setiap larangan yang ada di Lapas. Namun hukuman disiplin tersebut, tidak dapat menjamin warga binaan mau menaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi; kedua, pelaksanaan sanksi hukuman disiplin bagi warga binaan yang melanggar tata tertib di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan ialah apabila narapidana melakukan pelanggaran tata tertib, Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan meminta bagian administrasi keamanan dan ketertiban untuk melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan

pelanggaran tata tertib yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Tim Pengawas Pengamat untuk segera disidangkan. Kemudian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TPP untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan Kepala Lapas dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Hukuman disiplin dapat berupa hukuman yang sesuai dengan ketentuan dari Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Kata Kunci : Sanksi Hukuman Disiplin, Warga Binaan, Tata Tertib.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang luas dan merupakan negara hukum Pembangunan nasional yang mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara dengan tujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang berkeadilan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan perbuatan yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Hukum diciptakan manusia mempunyai tujuan menciptakan keadaan teratur, aman dan tertib. Demikian hukum pidana merupakan hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai dua fungsi yaitu: 1) Mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup didalam masyarakat. 2) Melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang keji dengan sanksi berupa pidana.

Hukum Pidana dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran norma hidup dalam masyarakat yang diatur hukum pidana positif Indonesia, karena pidana juga berfungsi sebagai pranata sosial dalam hal ini pidana adalah bagian dari reaksi sosial dalam masyarakat, dan proses penjatuhan pidana ini dilakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana yang sah dan berlaku di Indonesia.

Ketika pidana dijatuhkan sesuai sistem peradilan pidana di Indonesia maka seseorang yang dianggap bersalah melalui proses peradilan pidana dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana harus menjalankan pidana atau hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, dimana dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai tempat bagi seseorang yang telah dikatakan

bersalah dalam hukum pidana, selain menjadikan tempat untuk melakukan pembinaan bagi warga binaan agar menjadi manusia yang lebih baik dan tidak lagi.

Sistem pemasyarakatan menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 Pemasyarakatan suatu tatanan mengenai arah, batas metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu. Pada hakekatnya pelaksanaan sistem pemasyarakatan sebagai suatu sistem pembinaan adalah sebuah kegiatan dengan sifat yang multidimensional, karena upaya pemulihan kesatuan hubungan dapat dikatakan sebagai masalah yang sangat kompleks. Dalam sistem pemasyarakatan sendiri proses pengembalian narapidana ditempuh melalui pentahapan dalam program pembinaan.

Pelaksanaannya dibutuhkan suasana kondusif, serta aman dan tertib supaya proses pembinaan narapidana dapat dengan maksimal dilakukan dan mampu memberikan hasil yang terbaik. Kondisi lingkungan Lapas sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan pembinaan. Namun pada kenyataannya Lapas adalah Institusi yang sangat rentan terjadinya berbagai tindak pelanggaran, baik itu yang tergolong ringan maupun sampai dengan pelanggaran berat yang menyebabkan resiko gangguan keamanan dan ketertiban Lapas itu sendiri.

Dalam menjalani masa hukuman di dalam Lapas, setiap narapidana mesti menjunjung tinggi peraturan dan tata tertib yang sudah diterapkan oleh Lapas sesuai dengan yang dijelaskan pada Bab II Pasal 11 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Hidup di dalam Lapas narapidana tidak terlepas dari batasan-batasan yang mengatur antara kewajiban dan larangannya. Hal tersebut sudah jelas ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

Penjatuhan sanksi pelanggaran disiplin narapidana terbagi tiga tingkatan berdasarkan aspek peraturan yang termuat pada Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, meliputi : 1) Hukuman disiplin tingkat ringan 2) hukuman disiplin tingkat sedang, dan 3) hukuman disiplin tingkat berat.

Tindak pelanggaran berasal dari narapidana akan diikuti adanya suatu hukuman harus diterima oleh narapidana sesuai bentuk pelanggaran di perbuat.

Penegakan diterapkan menangani pelanggaran peraturan disiplin narapidana. Hukuman disiplin dalam bentuk sanksi administrasi memiliki tujuan agar dapat mendidik narapidana untuk tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukan.

Proses penjatuhan hukuman disiplin sendiri dilaksanakan berdasarkan tata cara pelaksanaan yang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Penegakan hukuman disiplin terhadap narapidana sangat diperlukan pada Lapas dalam kondisi seperti yang terjadi sekarang ini. Lemahnya penegakan hukuman disiplin terhadap narapidana akan mengundang ketidaktaatan narapidana terhadap tata tertib yang telah dibuat oleh Lapas.

Pelanggaran tata tertib di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan diketahui sering terjadi menyebabkan narapidana diantaranya dicatat dalam buku register F pelanggaran dilakukan sudah tergolong pelanggaran tingkat berat. Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang “Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Yang Melanggar Tata Tertib di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian kualitatif yang menggunakan populasi dan sampel dalam pengumpulan data.

Lokasi Penelitian

Penelitian di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan terkait sanksi hukuman disiplin bagi warga binaan yang melanggar tata tertib.

Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan pendekatan kualitatif yang merupakan suatu penelitian yang ditentukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Jenis Data

Sumber data hukum dalam penulisan ini bersumber dari bahan hukum empiris. Dimana sumber data Primernya diperoleh langsung dari lapangan dimana seseorang melakukan penelitian seperti dokumen dan lain-lain. Pada bagian ini jenis data yang dibagi seperti hasil wawancara, gambar, dan observasi. Sedangkan sumber data sekundernya diperoleh dari studi kepustakaan yaitu berupa buku-buku, literatur hukum dan artikel ilmiah.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui survey lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber utama yang dilihat melalui penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi: Metode menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok.
2. Wawancara: Teknik interaksi pewawancara mengajukan pertanyaan terkait masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung.
3. Dokumentasi: catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Tiga teknik pengumpulan data ini digunakan dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang diperlukan mengenai sanksi hukuman disiplin bagi warga binaan yang melanggar tata tertib di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Teknik Pengambilan Sampel dan Penentuan Responden

Pengambilan sampel pada penelitian ini dengan cara purposive sampling yaitu penarikan sampel dilakukan dengan mengambil subyek yang didasarkan pada tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah, yaitu beberapa Warga Binaan, dan Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Teknik Analisis Data

Materi membahas tentang teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yang mencakup:

1. Reduksi Data: proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Ini melibatkan membuat ringkasan, pengkodean, menemukan tema, menggolongkan, dan membuat partisi data.
2. Triangulasi: Triangulasi adalah teknik untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara atau pengamatan terhadap objek penelitian dengan sumber data lainnya. Ini dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen.
3. Menarik Kesimpulan: Setelah pengumpulan dan analisis data dilakukan, penganalisis kualitatif mencari makna, pola, penjelasan, dan proposisi dari data tersebut. Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan berkembang menjadi lebih terperinci seiring dengan analisis yang lebih mendalam.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif ini membantu mengolah data menjadi pemahaman yang lebih mendalam, memverifikasi kebenaran data, dan akhirnya menyusun kesimpulan yang informatif dari hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan

Sistem pemasyarakatan pada saat ini bertujuan untuk melakukan pembinaan dan pembimbingan agar warga binaan dan anak didik pemasyarakatan bisa kembali ketengah masyarakat, hidup dengan layak bertakwa dan taat kepada hukum serta terciptanya kehidupan sosial yang damai, aman, dan tentram. Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Keamanan dan tata tertib merupakan bagian dari pelaksanaan program-program pembinaan. Oleh karena itu suasana aman dan tertib di Lembaga Pemasyarakatan perlu diciptakan.

Namun untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan perlu adanya tata tertib yang wajib dipatuhi beserta mekanisme

penjatuhan hukuman disiplin oleh setiap Warga Binaan Pemasyarakatan. Peranan hukuman disiplin di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan sangatlah penting karena tidak hanya untuk menciptakan rasa aman dan tertib di Lapas tetapi juga agar setiap narapidana dapat menaati dan mematuhi setiap kewajiban dan larangan.

Kewajiban yang harus ditaati oleh setiap narapidana menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yakni: Setiap Narapidana atau Tahanan wajib:

1. Taat menjalankan ibadah sesuai agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya serta memelihara kerukunan beragama
2. Mengikuti seluruh kegiatan yang diprogramkan
3. Patut, taat, dan hormat kepada petugas
4. Mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
5. Memelihara kerapihan dan berpakaian sesuai dengan norma kesopanan
6. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan hunian serta mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka kebersihan lingkungan hunian
7. Mengikuti apel kamar yang dilaksanakan oleh petugas pemasyarakatan.

Aturan mengenai kewajiban bagi narapidana itu sendiri, tidak dapat menjamin bahwa apapun yang sudah jelas wajib bagi narapidana taati malah justru dilanggar ataupun sulit untuk dilaksanakan. Perlu adanya batasan atau larangan yang tidak boleh dilakukan oleh narapidana dan harus taat pada setiap larangan.

Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, mengenai larangan dilakukan warga binaan pemasyarakatan, yakni:

1. Mempunyai hubungan keuangan dengan Narapidana atau Tahanan lain maupun dengan Petugas Pemasyarakatan
2. Melakukan perbuatan asusila dan/atau penyimpangan seksual
3. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian
4. Memasuki Steril Area atau tempat tertentu yang ditetapkan Kepala Lapas atau Rutan tanpa izin dari Petugas Pemasyarakatan yang berwenang

5. Melawan atau menghalangi Petugas Pemasarakatan dalam menjalankan tugas
6. Membawa, menyimpan uang secara tidak sah dan barang berharga lainnya
7. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotikadan/atau precursor narkotika serta obat-obatan lain yang berbahaya
8. Menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi minuman yang mengandung alcohol
9. Melengkapi kamar hunian dengan alat pendingin, kipas angin, televisi, dan/atau alat elektronik lainnya
10. Memiliki, membawa dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya
11. Melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian
12. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya;
13. Membawa, menyimpan barang yang menimbulkan ledakan kebakaran
14. Melakukan tindakan kekerasan, baik kekerasan fisik maupun psikis, terhadap sesama Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, atau tamu/pengunjung
15. Mengeluarkan perkataan yang bersifat provokatif yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban
16. Membuat tato, memanjangkan rambut bagi Narapidana atau Tahanan Laki-laki, membuat tindik, mengenakan anting, atau lainnya yang sejenis
17. Memasuki blok dan/atau kamar hunian lain tanpa izin Petugas Pemasarakatan
18. Melakukan aktifitas yang mengganggu/ membahayakan keselamatan pribadi atau Narapidana, Tahanan, Petugas Pemasarakatan, pengunjung, atau tamu
19. Melakukan perusakan terhadap fasilitas Lapas atau Rutan

20. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan
21. Menyebarkan ajaran sesat
22. Melakukan aktifitas lain yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban Lapas atau Rutan.

Dari sekian banyak kewajiban dan larangan mengenai aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap narapidana tidak bisa menjamin bahwa warga binaan yang sudah dibina itu pasti mau menaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi. Permasalahan yang sering timbul terjadi disebabkan oleh narapidana itu sendiri, karena dalam pelaksanaannya mereka banyak melanggar dengan cara mencari kelemahan atau celah dari pihak petugas.

Dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan yang dihadapi Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan dari warga binaan itu sendiri:

1. Adanya permasalahan di luar Lapas

Sering kali permasalahan antar narapidana terjadi karena disebabkan adanya permasalahan di luar Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, maksudnya dalam hal ini sebelum narapidana tersebut melakukan tindak pidana atau sebelum berada di Lapas sesungguhnya mereka mempunyai konflik pribadi di lingkungan masyarakat, sehingga permasalahan selama berada di lingkungan masyarakat yang narapidana dirasa belum terselesaikan ketika narapidana tersebut yang berkonflik bertemu dalam satu sel yang sama di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, narapidana tersebut akan berupaya untuk menyelesaikannya di dalam Lapas walaupun kewajiban dan larangan diberlakukan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan narapidana melanggarnya demi menyelesaikan permasalahannya.

2. Permasalahan dari Narapidana

Permasalahan dari narapidana yang sering terjadi pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan narapidana di dalam Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan karena faktor kesalahpahaman antara narapidana satu dengan narapidana yang lain.

3. Kebutuhan Khusus

Kebutuhan khusus yang sering terjadi di Lapas. Situasi, tempat yang menjadi pelaksanaan dalam kebutuhan narapidana. Tidak dipungkiri dalam pelaksanaannya

narapidana banyak sekali melanggar aturan demi untuk kepentingan diri sendiri dengan cara mencari kelemahan pihak petugas untuk melakukan pelanggaran.

Berdasarkan paparan data di atas, maka mendapatkan temuan bahwa peranan hukuman disiplin bagi warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan, ialah sangatlah penting, dikarenakan untuk menciptakan rasa aman dan tertib bagi warga binaan. Selain itu, dengan adanya hukuman disiplin, warga binaan berkewajiban menaati dan mematuhi setiap larangan yang ada di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan. Namun hukuman disiplin tersebut, tidak dapat menjamin warga binaan mau menaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi. Permasalahan yang sering timbul terjadi disebabkan oleh narapidana itu sendiri, karena dalam pelaksanaannya narapidana banyak melanggar dengan cara mencari kelemahan atau celah dari pihak petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan.

Pelaksanaan Sanksi Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Yang Melanggar Tata Tertib di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan

Pengamanan dan penertiban merupakan syarat mutlak untuk terlaksananya program-program pembinaan disetiap Lapas. Oleh karena itu suasana aman dan tertib senantiasa dikondisikan dengan berbagai cara strategis memantau, menangkal, dan mencegah sedini mungkin gangguan keamanan dan ketertiban yang timbul baik dalam maupun dari luar Lapas. Pihak petugas Lapas melakukan pengawasan para narapidana agar tidak terjadinya pelanggaran tata tertib Lapas.

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dapat berupa pelanggaran ringan, sedang dan berat. Jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana atau tahanan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib: embaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara, sebagai berikut:

1. Pelanggaran Tingkat Ringan, mencakup:
 - a. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan
 - b. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok
 - c. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan
 - d. Tidak mengikuti apel pada waktu yang telah ditentukan

- e. Mengenakan anting, kalung, cincin, dan ikat pinggang
 - f. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan
 - g. Melakukan tindakan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan.
2. Pelanggaran Tingkat Sedang, mencakup:
- a. Memasuki Steril Area tanpa izin petugas
 - b. Membuat tato dan/atau peralatannya, tindik, atau sejenisnya
 - c. Melakukan aktifitas membahayakan keselamatan diri sendiri atau orang lain
 - d. Mengeluarkan perkataan yang tidak pantas yang melanggar norma keagamaan
 - e. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang
 - f. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari 1 (satu) kali
 - g. Melakukan tindakan pertimbangan sidang tim pengamat pemasyarakatan termasuk perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.
3. Pelanggaran Tingkat Berat, mencakup:
- a. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan
 - b. Mengancam, melawan, atau melakukan penyerangan terhadap petugas
 - c. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam, atau sejenisnya
 - d. Merusak fasilitas lapas atau rutan
 - e. Mengancam, memprovokasi, menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban
 - f. Memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik
 - g. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan/ mengkonsumsi alkohol
 - h. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan, / mengkonsumsi narkotika
 - i. Melakukan upaya melarikan diri / membantu narapidana untuk melarikan diri
 - j. Melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama penghuni maupun petugas
 - k. Melakukan pemasangan atau menyuruh orang lain melakukan pemasangan instalasi listrik di dalam kamar hunian

- l. Melengkapi kepentingan pribadi di luar ketentuan, alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu, dan/atau alat elektronik lainnya di kamar hunian
- m. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual
- n. pencurian, pemerasan, perjudian, atau penipuan; Menyebarkan ajaran sesat
- o. Melakukan perbuatan yang termasuk kategori hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP
- p. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TPP termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan hukuman disiplin tingkat berat.

Penjatuhan hukuman disiplin diberikan ketika narapidana yang patut diduga melakukan pelanggaran disiplin. Setelah mengetahui pelanggaran yang dilakukan oleh narapidana maka kemudian hukuman disiplin dapat dijatuhkan kepada narapidana. Berat ataupun ringannya pemberian hukuman disiplin bagi narapidana dilihat dari besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.

Dari ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013, jenis hukuman disiplin bagi narapidana yang melanggar tata tertib, yakni:

1. Hukuman Disiplin tingkat ringan, meliputi:
 - a. Memberikan peringatan secara lisan
 - b. Memberikan peringatan secara tertulis.
2. Hukuman Disiplin tingkat sedang, meliputi :
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 (enam) hari
 - b. Menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu berdasarkan hasil Sidang TPP.
3. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa penundaan waktu pelaksanaan kunjungan.
4. Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
 - a. Memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari

- b. Tidak mendapatkan hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun berjalan dan dicatat dalam register F.
5. Untuk alasan kepentingan keamanan, seorang Narapidana/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat dalam register H.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Pamekasan, maka dapat diketahui dari tahun 2021-2023 ada sekitar 323 orang yang melakukan pelanggaran tata tertib. Sebagaimana tertera di tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Jenis Pelanggaran Tata Tertib di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan

No.	Jenis-Jenis Pelanggaran	Jumlah Pelanggar	Hukuman	Tahun
1	Pelanggaran Tingkat Ringan	64 orang	Peringatan teguran	2021
	Pelanggaran Tingkat Sedang	73 orang	Penundaan waktu pelaksanaan kunjungan	
	Pelanggaran Tingkat Berat	-	-	
2	Pelanggaran Tingkat Ringan	50 orang	Peringatan teguran	2022
	Pelanggaran Tingkat Sedang	47 orang	Penundaan waktu pelaksanaan kunjungan	
	Pelanggaran Tingkat Berat	-	-	
3	Pelanggaran Tingkat Ringan	65 orang	Peringatan teguran	2023
	Pelanggaran Tingkat Sedang	24 orang	Penundaan waktu pelaksanaan kunjungan	
	Pelanggaran Tingkat Berat	-	-	

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat diketahui bahwa pelanggaran-pelanggaran diatas merupakan pelanggaran dengan jenis tingkatan ringan, dan sedang. Sekaligus menjelaskan hukuman apa saja yang diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran tata tertib tersebut.

1. Pelanggaran Tingkat Ringan

Dalam hal pelanggaran tingkat ringan yaitu tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan. hukuman yang diterapkan terhadap pelanggaran tingkat ringan tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang telah ditentukan.

Sehingga setiap narapidana dituntun untuk selalu mematuhi segala aturan Lapas seperti memakai pakaian seragam.

2. Pelanggaran Tingkat Sedang

Pelanggaran tingkat sedang yaitu melakukan perbuatan/mengeluarkan perkataan tidak pantas dan melanggar norma kesopanan. penerapan hukuman disiplin berupa peringatan teguran dan tertulis yang tercatat dibuku keamanan Lapas.

Penyebab narapidana melakukan pelanggaran tingkat sedang, seperti narapidana mengeluarkan perkataan yang tidak pantas disebabkan faktor kesalahpahaman baik dari segi narapidana satu dengan narapidana yang lain maupun dari segi narapidana dengan petugas Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan. Jadi dalam upaya menangani kasus tersebut setidaknya petugas harus segera mengambil langkah cepat dalam menyelesaikan hal tersebut supaya nanti harapannya agar nantinya hal tersebut jangan sampai berakibat lebih jauh lagi pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana masuk dalam kategori pelanggaran disiplin tingkat berat.

Dalam penerapan hukuman disiplin terhadap pelanggaran, baik pelanggaran tingkat ringan, tingkat sedang dan tingkat berat, maka di dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, yakni: “Dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Narapidana atau Tahanan diduga tindak pidana, Kepala Lapas atau Kepala Rutan meneruskan kepada instansi yang berwenang”.

Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan meminta bagian administrasi keamanan & ketertiban pemeriksaan, membuat Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran tata tertib selanjutnya diserahkan keKetua TPP untuk disidangkan. Kemudian hasil yang dilakukan oleh Tim Pengawas Pengamat (TPP) selanjutnya dijadikan pertimbangan Kepala Lapas dalam menjatuhkan hukuman disiplin.

Penerapan hukuman disiplin merupakan wujud dari pembinaan Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tata tertib, berbagai upaya telah dilakukan oleh pihak Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan dalam mencegah narapidana melakukan pelanggaran tata tertib pencegahan agar tidak terjadi perbuatan pelanggaran tata tertib dengan memberikan pembinaan kepada narapidana.

Peran petugas sangatlah penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan dari gangguan-gangguan yang disebabkan oleh narapidana serta menegakkan hukum secara tegas dan adil terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran demi terwujudnya tujuan dari pemsayarakatan itu sendiri. Maka dalam hal ini upaya yang dilakukan petugas dalam melakukan pencegahan ketika terjadi pelanggaran disiplin yang dilakukan warga binaan pemsayarakatan sudah baik, sehingga nantinya akan menimbulkan efek jera kepada warga binaan yang melanggar tata tertib Lapas tersebut.

Berdasarkan paparan data di atas, maka peneliti mendapatkan temuan penelitian bahwa pelaksanaan sanksi hukuman disiplin bagi warga binaan yang melanggar tata tertib di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan ialah apabila narapidana melakukan pelanggaran tata tertib, Kepala Pengamanan Lembaga Pemsayarakatan meminta bagian administrasi keamanan dan ketertiban untuk melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran tata tertib yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua TPP untuk segera disidangkan. Kemudian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pengawas Pengamat (TPP) untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan Kepala Lapas dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Hukuman disiplin dapat berupa hukuman yang sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemsayarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

KESIMPULAN

1. Peranan hukuman disiplin bagi warga binaan di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan penting untuk menciptakan rasa aman dan tertib bagi warga binaan. adanya hukuman disiplin, warga binaan berkewajiban menaati dan mematuhi setiap larangan yang ada di Lapas. Namun hukuman disiplin, tidak dapat menjamin warga binaan mau menaati peraturan dan tidak melakukan kejahatan lagi.
2. Pelaksanaan sanksi hukuman disiplin bagi warga binaan yang melanggar tata tertib di Lapas Narkotika Kelas IIA Pamekasan ialah apabila narapidana melakukan pelanggaran tata tertib, Kepala Pengamanan

Lembaga Pemasyarakatan meminta bagian administrasi keamanan dan ketertiban untuk melakukan pemeriksaan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan pelanggaran tata tertib yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Tim Pengawas Pengamat untuk segera disidangkan. Kemudian hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh TPP untuk selanjutnya dijadikan pertimbangan Kepala Lapas dalam menjatuhkan hukuman disiplin. Hukuman disiplin dapat berupa hukuman yang sesuai dengan ketentuan dari Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulah Safe'i, Pola Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Islam Di Indonesia, Bandung: CV Dida, 2021.
- Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, Banten: UNPAM Press, 2018.
- Buna'i, Buku Ajar Metodologi Penelitian, Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2006,
- Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- H. Achmad Sulchan, Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan, Semarang: Unissula Press, 2020.
- Ibnu Abdul Khalid, Peranan Hukuman Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melarikan Diri Dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bukittinggi, Skripsi: Universitas Andalas Padang, 2021.
- Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2014.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, BN Nomor 356, Pasal 1.
- Jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Lalu Ahmad Jannatul Adnan, Implementasi Permenkumham Nomor 29 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana, Unizar Recht Journal, Vol. 2, No. 1, 2023.
- Marsudi Utoyo, Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pranata Hukum, Vol. 10, No. 1, 2015.

- Maya Shafira, *Hukum Pemsayarakatan Dan Penitensier*, Bandar Lampung: Pustaka Media, 2022.
- Muhammad, *Metode Penelitian Bahasa*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, BN Nomor 356, Pasal 9.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pasal 8.
- Rey Japa Bramada, Implementasi Penegakan Hukuman Disiplin Narapidana Pelanggar Tata Tertib, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2023.
- Rm. Berlian, Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Berdasarkan Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II B Jambi, Skripsi: Universitas Batanghari, 2022.
- S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 6.
- Victorio H. Situmorang, Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum, *Jurnal Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI*. Vol. 13, No. 1, 2019.
- Yanuar Arya Satya, Implementasi Dan Eksistensi Hukuman Disiplin Bagi Narapidana (Studi Kasus Di Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Ponorogo), Skripsi: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.